



Kementerian Agama

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS	
TAHUN PMPZI	: 2025
KODE/NAMA SATUAN KERJA	: 425670/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN
PENANGGUNGJAWAB	: 197306132007101004/ASMAN, S.AG
ALAMAT	: JL. RAYA GLAGAH NO. 12 GLAGAH KEC. GLAGAH KAB. LAMONGAN JAWA TIMUR

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
1	PENGUNGKIT		53.14	88.56%		
2	PEMENUHAN		28.32	94.38%		
3	MANAJEMEN PERUBAHAN		4	100%		
4	Penyusunan Tim Kerja		0.5	100%		
5	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Keterangan: Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Y	1		(1) SK TIM ZI	(1) SK TIM ZI
6	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas Keterangan: a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A	1		(1) 1. Undangan rapat pembentukan tim kerja 2. Daftar hadir 3. Notulensi 4. Draft SK Tim Kerja 5. Dokumentasi/Foto	(1) 1. Undangan rapat pembentukan tim kerja 2. Daftar hadir 3. Notulensi 4. Draft SK Tim Kerja 5. Dokumentasi/Foto
7	Rencana Pembangunan Zona Integritas		1	100%		
8	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Keterangan: Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Y	1		(1) Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	(1) Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
9	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM Keterangan: a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A	1		(1) DOKUMEN RENCANA AKSI	(1) DOKUMEN RENCANA AKSI

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
10	<p>Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala</p> <p>b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala</p> <p>c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan</p>	A	1		(1) Dokumen sosialisasi baik berupa kegiatan sosialisasi/Website/ media sosial/Banner/media I	(1) Dokumen sosialisasi baik berupa kegiatan sosialisasi/Website/ media sosial/Banner/media lainnya
11	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM		1	100%		
12	<p>Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana</p>	A	1		(1) Matriks Ketercapaian Program ZI	(1) Matriks Ketercapaian Program ZI
13	<p>Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala</p> <p>b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala</p> <p>c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala</p> <p>d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas</p>	A	1		(1) 1. Undangan rapat monev pembangunan ZI 2. Daftar hadir 3. Notulensi 4. Hasil Evaluasi (Laporan/matrik yang menyajikan catatan hasil evaluasi program kerja) yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim kerja 5. Dokumentasi/Foto (2) laporan monev zi_2025	(1) 1. Undangan rapat monev pembangunan ZI 2. Daftar hadir 3. Notulensi 4. Hasil Evaluasi (Laporan/matrik yang menyajikan catatan hasil evaluasi program kerja) yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim kerja 5. Dokumentasi/Foto (2) laporan monev zi_2025
14	<p>Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti</p> <p>b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti</p> <p>c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti</p> <p>d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti</p>	A	1		(1) HASIL MONEV DI TL (2) FOTO PROSES PEMBANGUNAN	(1) HASIL MONEV DI TL (2) FOTO PROSES PEMBANGUNAN
15	Perubahan pola pikir dan budaya kerja		1.5	100%		
16	<p>Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM</p> <p>Keterangan:</p> <p>ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.</p>	Y	1		(1) Sk Role Model (2) Dokumen Pimpinan sebagai role model (3) Absensi Pimpinan	(1) Sk Role Model (2) Absensi Pimpinan (3) Dokumen Pimpinan sebagai role model
17	<p>Sudah ditetapkan agen perubahan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya</p> <p>b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya</p> <p>c. Jika belum terdapat agen perubahan</p>	A	1		(1) SK AGEN PERUBAHAN	(1) SK AGEN PERUBAHAN

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
18	<p>Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan</p> <p>b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan</p> <p>c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir</p>	A	1		(1) SK BUDAYA KERJA (2) dokumen pimpinan (3) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI	(1) SK BUDAYA KERJA (2) dokumen pimpinan (3) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI
19	<p>Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan</p> <p>b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>	A	1		(1) PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS (2) Laporan Monev ZI (3) sk tim zi	(1) PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS (2) Laporan Monev ZI (3) sk tim zi
20	PENATAAN TATALAKSANA		3.25	92.86%		
21	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama		1	100%		
22	<p>SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras</p> <p>b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis</p> <p>c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis</p> <p>d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis</p>	A	1		(1) SK SOP (2) KMA 1364 Tahun 2021 (3) SOP MTsN 2 LAMONGAN (4) Inovasi Pelaksanaan Prosedur Kerja	(1) SK SOP (2) KMA 1364 Tahun 2021 (3) SOP MTsN 2 LAMONGAN (4) Inovasi Pelaksanaan Prosedur Kerja
23	<p>Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan</p> <p>b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi</p> <p>d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi</p> <p>e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi</p>	A	1		(1) SK SOP (2) INOVASI SOP (3) SOP MTSN 2 LAMONGAN (4) LAPORAN MONEV SOP (5) Laporan Pelaksanaan SOP MTsN 2 Lamongan	(1) SK SOP (2) INOVASI SOP (3) SOP MTSN 2 LAMONGAN (4) LAPORAN MONEV SOP (5) Laporan Pelaksanaan SOP MTsN 2 Lamongan
24	<p>Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP</p> <p>b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP</p> <p>c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti</p> <p>d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi</p>	A	1		(1) Laporan MONEV SOP (2) SOP MTSN 2 LAMONGA	(1) Laporan MONEV SOP (2) SOP MTSN 2 LAMONGAN
25	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2	100%		
26	<p>Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi</p> <p>b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi</p> <p>c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi</p>	A	1		(1) Pengukuran Kinerja (2) capture sipka (3) skp ASMAN	(1) Pengukuran Kinerja (2) capture sipka (3) skp ASMAN

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
27	<p>Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi Keterangan: a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM</p>	A	1		(1) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (2) screenshot Aplikasi kepegawean (3) screenshot Aplikasi em	(1) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (2) screenshot Aplikasi kepegawean (3) screenshot Aplikasi emis
28	<p>Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi Keterangan: a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi</p>	A	1		(1) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (2) aplikasi ppdb online	(1) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (2) aplikasi ppdb online
29	<p>Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik Keterangan: a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik</p>	A	1		(1) LAPORAN MONEV TIK	(1) LAPORAN MONEV TIK
30	Keterbukaan Informasi Publik		0.25	50%		
31	<p>Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan Keterangan: a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik</p>	B	0.5		(1) SK PPID (2) kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan (3) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (4) aplikasi ppdb online	(1) kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan (2) SK PPID (3) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (4) aplikasi ppdb online
32	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Keterangan: a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan</p>	B	0.5		(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Penggunaan e-Office sebagai Keterbukaan Informasi (2) LAPORAN Monev Penggunaan e-Office sebagai Keterbukaan Informasi	(1) LAPORAN Monev Penggunaan e-Office sebagai Keterbukaan Informasi (2) Tindak Lanjut Hasil Monev Penggunaan e-Office sebagai Keterbukaan Informasi
33	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		4.72	94.45%		
34	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		0.22	89%		
35	<p>Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan Keterangan: Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.</p>	Y	1		(1) anjab ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA (2) Analisis Kebutuhan Guru MTsN 2 Lamongan (2025)	(1) anjab ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA (2) Analisis Kebutuhan Guru MTsN 2 Lamongan (2025)

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
36	<p>Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan Keterangan: a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan</p>	B	0.67		(1) Analisis Kebutuhan Guru MTsN 2 Lamongan (2025) (2) SK DISTRIBUSI JADWAL 2025	(1) Analisis Kebutuhan Guru MTsN 2 Lamongan (2025) (2) SK DISTRIBUSI JADWAL 2025
37	<p>Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja Keterangan: Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.</p>	Y	1		(1) Laporan Monev Hasil Penempatan Pegawai_2025 (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Pegawai (3) SKP (4) 5 Capaian Kinerja_Tahunan MTsN 2 LAMON	(1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Pegawai (2) Laporan Monev Hasil Penempatan Pegawai_2025 (3) SKP (4) 5 Capaian Kinerja_Tahunan MTsN 2 LAMONGAN
38	Pola Mutasi Internal		0.46	91.67%		
39	<p>Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan Keterangan: Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.</p>	Y	1		(1) DAFTAR MUTASI GURU DAN PEGAWAI (2) sk distribusi jadwal (3) sk distribusi jadwal (4) PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI	(1) DAFTAR MUTASI GURU DAN PEGAWAI (2) sk distribusi jadwal (3) sk distribusi jadwal (4) PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI
40	<p>Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Keterangan: a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi</p>	B	0.75		(1) SOP MUTASI (2) DAFTAR MUTASI PEGAWAI (3) DAFTAR WORKSHOP-DIKLAT	(1) SOP MUTASI (2) DAFTAR MUTASI PEGAWAI (3) DAFTAR WORKSHOP-DIKLAT
41	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Keterangan: Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.</p>	Y	1		(1) Laporan Monev Hasil Penempatan Pegawai_2025 (2) MUTASI ANTAR JABATAN (3) CAPAIAN KINERJA UNIT SATKER	(1) Laporan Monev Hasil Penempatan Pegawai_2025 (2) MUTASI ANTAR JABATAN (3) CAPAIAN KINERJA UNIT SATKER
42	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		1.04	83.33%		
43	<p>Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi Keterangan: Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.</p>	T	0		(1) TNA MTsN 2 (2) DAFTAR WORKSHOP (3) UPAYA PENGEMBANGAN	(1) TNA MTsN 2 (2) DAFTAR WORKSHOP (3) UPAYA PENGEMBANGAN

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
44	<p>Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Keterangan: a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai</p>	A	1		(1) TNA MTsN 2 lamongan (2) LAPORAN HASIL SUPERVISI	(1) TNA MTsN 2 lamongan (2) LAPORAN HASIL SUPERVISI
45	<p>Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan Keterangan: a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%</p>	A	1		(1) REKAPITULASI DATA PEGAWAI TERSERTIFIKASI	(1) REKAPITULASI DATA PEGAWAI TERSERTIFIKASI
46	<p>Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya Keterangan: a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p>	A	1		(1) daftar workshop (2) upaya pengembangan	(1) daftar workshop (2) upaya pengembangan
47	<p>Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) Keterangan: a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai</p>	A	1		(1) UPAYA PENGEMBANGAN (2) DAFTAR WORKSHOP-DIKLAT GURU 2025	(1) UPAYA PENGEMBANGAN (2) DAFTAR WORKSHOP-DIKLAT GURU 2025
48	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Keterangan: a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan</p>	A	1		(1) Laporan Monev Hasil Penempatan Pegawai_2025 (2) Laporan monev hasil pengembangan kompetensi (3) skp	(1) Laporan Monev Hasil Penempatan Pegawai_2025 (2) Laporan monev hasil pengembangan kompetensi (3) skp
49	Penetapan Kinerja Individu		2	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
50	<p>Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)</p> <p>b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p>	A	1		(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN -TTD (2) skp (3) perkin	(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN -TTD (2) skp (3) perkin
51	<p>Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logic model</p> <p>b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p> <p>c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p> <p>d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p>	A	1		(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I (3) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN II (4) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN III (5) SKP	(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I (3) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN II (4) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN III (5) SKP
52	<p>Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan</p> <p>b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan</p> <p>c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran</p> <p>d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan</p> <p>e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan</p>	A	1		(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I (3) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN II (4) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN III	(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I (3) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN II (4) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN III
53	<p>Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward</p> <p>Keterangan:</p> <p>Ya, jika hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)</p>	Y	1		(1) SK REWARD	(1) SK REWARD
54	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		0.75	100%		
55	<p>Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi</p> <p>d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi</p>	A	1		(1) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025 (2) TATA TERTIB	(1) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025 (2) TATA TERTIB
56	Sistem Informasi Kepegawaian		0.25	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
57	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala Keterangan: a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A	1		(1) SK PENGELOLAHAN SIM	(1) SK PENGELOLAHAN SIM
58	PENGUATAN AKUNTABILITAS		4.74	94.81%		
59	Keterlibatan Pimpinan		2.5	100%		
60	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan Keterangan: a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A	1		(1) Pimpinan Terlibat dalam penyusunan perencanaan (2) Pimpinan Terlibat dalam Penyusunan Perkin	(1) Pimpinan Terlibat dalam penyusunan perencanaan (2) Pimpinan Terlibat dalam Penyusunan Perkin
61	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja Keterangan: a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A	1		(1) Pimpinan Terlibat dalam Penyusunan Perkin	(1) Pimpinan Terlibat dalam Penyusunan Perkin
62	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Keterangan: a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A	1		(1) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I OK (2) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN II OK (3) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN III OK (4) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN	(1) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I OK (2) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN II OK (3) Lap_Triwulan_1752718140_sipka_425670_MTsN_2_LAMONGAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN III OK (4) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN
63	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		2.24	89.63%		
64	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada Keterangan: ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Y	1		(1) PERKIN (2) RKAKL PETIKAN DIPA (3) RKAM_MTSN2 Tahun 2025 (4) RKJM (5) RKTM (6) RENSTRA	(1) PERKIN (2) RKAKL PETIKAN DIPA (3) RKAM_MTSN2 Tahun 2025 (4) RKJM (5) RKTM (6) RENSTRA
65	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Keterangan: ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Y	1		(1) PERKIN (2) RENSTRA (3) EDM (4) RKAKL 2025 DAN PETIKAN DIPA (5) RKAM (6) RKTM (7) RKJM	(1) PERKIN (2) RENSTRA (3) EDM (4) RKAKL 2025 DAN PETIKAN DIPA (5) RKAM (6) RKTM (7) RKJM
66	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keterangan: ya, jika unit kerja memiliki IKU	Y	1		(1) RENSTRA (2) IKU	(1) RENSTRA (2) IKU

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
67	Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART Keterangan: a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	B	0.67		(1) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (2) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN	(1) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (2) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN
68	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu Keterangan: Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Y	1		(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III	(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III
69	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Keterangan: a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A	1		(1) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN (2) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III	(1) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (2) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN
70	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Keterangan: ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Y	1		(1) APLIKASI SIPKA (2) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (3) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN	(1) APLIKASI SIPKA (2) MTsN_2_LAMONGAN_LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (3) Lap_CapKin_Tahunan_2024_sipka_425670_LKJ 2024 MTsN 2 LAMONGAN
71	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja Keterangan: a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	B	0.5		(1) BENDAHARA (2) PPK	(1) BENDAHARA (2) PPK
72	PENGUATAN PENGAWASAN		6.84	91.25%		
73	Pengendalian Gratifikasi		1.13	75%		
74	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Keterangan: a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	B	0.5		(1) Dokumen SOSialisasi (2) Surat pemberitahuan	(1) Dokumen SOSialisasi (2) Surat pemberitahuan
75	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan Keterangan: a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A	1		(1) SK PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI-1 (2) SK PENETAPAN HARI ZONA INTEGRITAS (3) SOP GRATIFIKASI (4) PMA Nomor 23 Tahun 20	(1) SK PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI-1 (2) SK PENETAPAN HARI ZONA INTEGRITAS (3) SOP GRATIFIKASI (4) PMA Nomor 23 Tahun 2021
76	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		1.22	81.25%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
77	<p>Telah dibangun lingkungan pengendalian</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian</p>	A	1		(1) KODE ETIK GURU DAN PMA NO.12 TH 2019 (2) SK SPIP Nomor 52 Tahun 2025	<p>(1) KODE ETIK GURU DAN PMA NO.12 TH 2019</p> <p>(2) SK SPIP Nomor 52 Tahun 2025</p>
78	<p>Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko</p>	B	0.75		(1) Identifikasi Risiko (2) Penilaian Kegiatan Pengendalian Risiko 2025 (3) MATRIK MANAJEMEN RISIKO	<p>(1) Identifikasi Risiko</p> <p>(2) Penilaian Kegiatan Pengendalian Risiko 2025</p> <p>(3) MATRIK MANAJEMEN RISIKO</p>
79	<p>Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko</p>	A	1		(1) LAPORAN HASIL SUPERVISI (2) Berita Engslih Camp pare 2025 (3) BERITA KELAS IT (4) BERITA KELAS TAHFIDZ (5) DATA SISWA KELAS IX BERPRESTASI TAHUN PELAJARAN 2024-2025 (6) Inovasi SRA MTsN 2 Lamongan (7) Penilaian Kegiatan Pengendalian Risiko 2025	<p>(1) LAPORAN HASIL SUPERVISI</p> <p>(2) Berita Engslih Camp pare 2025</p> <p>(3) BERITA KELAS IT</p> <p>(4) BERITA KELAS TAHFIDZ</p> <p>(5) DATA SISWA KELAS IX BERPRESTASI TAHUN PELAJARAN 2024-2025</p> <p>(6) Inovasi SRA MTsN 2 Lamongan</p> <p>(7) Penilaian Kegiatan Pengendalian Risiko 2025</p>
80	<p>SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait</p> <p>c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait</p>	B	0.5		(1) NOTA DINAS (2) DOKUMEN SOSIALISASI website, banner, dan sosial media (3) SOP Gratifikasi	<p>(1) NOTA DINAS</p> <p>(2) DOKUMEN SOSIALISASI website, banner, dan sosial media</p> <p>(3) SOP Gratifikasi</p>
81	Pengaduan Masyarakat		1.5	100%		
82	<p>Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat</p>	A	1		(1) JUKNIS_PETUNJUK_PENANGANAN_DUMAS (2) SK DUMAS (3) SOP Pengaduan (4) EDARAN DUMAS	<p>(1) JUKNIS_PETUNJUK_PENANGANAN_DUMAS</p> <p>(2) SK DUMAS</p> <p>(3) SOP Pengaduan</p> <p>(4) EDARAN DUMAS</p>

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
83	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Keterangan: ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Y	1		(1) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Januari-Maret 2025 (2) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT JANUARI-MARET 2025 (3) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (4) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (5) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT JULI-SEPTEMBER 2025 (6) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT JULI-SEPTEMBER 2025 (7) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER-DESEMBER 2025 (8) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER-DESEMBER 2025	(1) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Januari-Maret 2025 (2) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT JANUARI-MARET 2025 (3) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (4) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (5) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT JULI-SEPTEMBER 2025 (6) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT JULI-SEPTEMBER 2025 (7) REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER-DESEMBER 2025 (8) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER-DESEMBER 2025
84	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Keterangan: a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A	1		(1) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Januari-Maret 2025 (2) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (3) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Juli-September 2025 (4) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Oktober-Desember 2025	(1) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Januari-Maret 2025 (2) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (3) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Juli-September 2025 (4) LAPORAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Oktober-Desember 2025
85	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Keterangan: a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A	1		(1) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Januari-Maret 2025 (2) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN Januari-Maret 2025 (3) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (4) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN APRIL-JUNI 2025 (5) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT JULI-SEPTEMBER 2025 (6) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN JULI-SEPTEMBER 2025 (7) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER-DESEMBER 2025 (8) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN OKTOBER-DESEMBER 2025	(1) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Januari-Maret 2025 (2) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN Januari-Maret 2025 (3) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2025 (4) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN APRIL-JUNI 2025 (5) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT JULI-SEPTEMBER 2025 (6) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN JULI-SEPTEMBER 2025 (7) MATRIKS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER-DESEMBER 2025 (8) MATRIKS TL MONEV PENANGANAN OKTOBER-DESEMBER 2025
86	Whistle-Blowing System		1.5	100%		
87	Whistle Blowing System telah diterapkan Keterangan: a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System	A	1		(1) SK TIM DUMAS DAN WBS (2) Edaran Dumas (3) Sop Pengaduan	(1) SK TIM DUMAS DAN WBS (2) Edaran Dumas (3) Sop Pengaduan

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
88	<p>Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala</p> <p>b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala</p> <p>c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi</p>	A	1		(1) LAPORAN WBS TW 1 (2) LAPORAN WBS TW II (3) LAPORAN WBS TW III (4) EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	(1) LAPORAN WBS TW 1 (2) LAPORAN WBS TW II (3) LAPORAN WBS TW III (4) EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
89	<p>Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja</p> <p>b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja</p> <p>c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti</p>	A	1		(1) LAPORAN WBS TW 1 (2) LAPORAN WBS TW II (3) LAPORAN WBS TW III (4) EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	(1) LAPORAN WBS TW I (2) LAPORAN WBS TW II (3) LAPORAN WBS TW III (4) EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
90	Penanganan Benturan Kepentingan		1.5	100%		
91	<p>Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama</p> <p>b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama</p> <p>c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama</p> <p>d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</p>	A	1		(1) BENTURAN KEPENTINGAN_KMA_225_2015 (2) MATRIK IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN-1 (3) Peta Potensi Fraud dan Benturan Kepentingan (4) SK SATGAS BENTURAN KEPENTINGAN 2025 (5) SOP BENTURAN	(1) BENTURAN KEPENTINGAN_KMA_225_2015 (2) MATRIK IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN-1 (3) Peta Potensi Fraud dan Benturan Kepentingan (4) SK SATGAS BENTURAN KEPENTINGAN 2025 (5) SOP BENTURAN
92	<p>Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan</p> <p>d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan</p>	A	1		(1) SURAT EDARAN PEMBERITAHUAN BENTURAN KEPENTINGAN (2) KODE ETIK GURU DAN PMA NO.12 TH 2019-converted (3) DISIPLIN POSITIF	(1) SURAT EDARAN PEMBERITAHUAN BENTURAN KEPENTINGAN (2) KODE ETIK GURU DAN PMA NO.12 TH 2019-converted (3) DISIPLIN POSITIF
93	<p>Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan</p> <p>d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan</p>	A	1		(1) SK SATGAS BENTURAN KEPENTINGAN 2025 (2) SOP BENTURAN KEPENTINGAN (3) Laporan Implementasi Benturan kepentingan	(1) SK SATGAS BENTURAN KEPENTINGAN 2025 (2) SOP BENTURAN KEPENTINGAN (3) Laporan Implementasi Benturan kepentingan
94	<p>Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja</p>	A	1		(1) HASIL EVALUASI DAN PENANGANAN BENTURAN	(1) HASIL EVALUASI DAN PENANGANAN BENTURAN

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
95	<p>Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Keterangan: a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja</p>	A	1		(1) HASIL EVALUASI DAN PENANGANAN BENTURAN (2) Laporan Implementasi Benturan kepentingan	(1) HASIL EVALUASI DAN PENANGANAN BENTURAN (2) Laporan Implementasi Benturan kepentingan
96	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		4.76	95.17%		
97	Standar Pelayanan		0.86	85.5%		
98	<p>Terdapat kebijakan standar pelayanan Keterangan: a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan</p>	B	0.75		(1) SK STANDAR PELAYANAN	(1) SK STANDAR PELAYANAN
99	<p>Standar pelayanan telah dimaklumkan Keterangan: a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p>	B	0.67		(1) Screenshot Maklumat Standar Pelayanan (2) ZONA INTEGRITAS	(1) Screenshot Maklumat Standar Pelayanan (2) ZONA INTEGRITAS
100	<p>Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Keterangan: a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p>	A	1		(1) LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN 2025	(1) LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN 2025
101	<p>telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan Keterangan: ya, telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan</p>	Y	1		(1) Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan 2025	(1) Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan 2025
102	Budaya Pelayanan Prima		0.9	90.33%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
103	<p>Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima Keterangan: a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p>	B	0.75		(1) UPAYA PENGEMBANGAN 2025 (2) DAFTAR WORKSHOP-DIKLAT GURU 2025	(1) UPAYA PENGEMBANGAN 2025 (2) DAFTAR WORKSHOP-DIKLAT GURU 2025
104	<p>Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Keterangan: a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses</p>	A	1		(1) Pelayanan mudah diakses	(1) Pelayanan mudah diakses
105	<p>Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan Keterangan: a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi</p>	B	0.67		(1) KMA AGAMA 990 (2) SK Reward & Punishment Guru Pegawai 2025	(1) KMA AGAMA 990 (2) SK Reward & Punishment Guru Pegawai 2025
106	<p>Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Keterangan: a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar</p>	A	1		(1) SK PEMBERIAN KOMPENSASI (2) SOP PEMBERIAN KOMPENSASI	(1) SK PEMBERIAN KOMPENSASI (2) SOP PEMBERIAN KOMPENSASI
107	<p>Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi Keterangan: a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi</p>	A	1		(1) Integrasi Pelayanan Digital di Website Madrasah	(1) Integrasi Pelayanan Digital di Website Madrasah

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
108	<p>Terdapat inovasi pelayanan Keterangan: a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan</p>	A	1		(1) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (2) GALERI PTSP	(1) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (2) GALERI PTSP
109	Pengelolaan Pengaduan		1	100%		
110	<p>Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! Keterangan: a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan</p>	A	1		(1) MEDIA WEBSITE PENGADUAN MASYARAKAT	(1) MEDIA WEBSITE PENGADUAN MASYARAKAT
111	<p>Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan Keterangan: a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja</p>	A	1		(1) SK TIM DUMAS DAN WBS (2) SOP Pengaduan	(1) SK TIM DUMAS DAN WBS (2) SOP Pengaduan
112	<p>Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi Keterangan: a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi</p>	A	1		(1) MATRIK IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN (2) MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	(1) MATRIK IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN (2) MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
113	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan		1	100%		
114	<p>Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Keterangan: a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p>	A	1		(1) Laporan Hasil SPKP-Triwulan I (2) Laporan Hasil SPKP-Triwulan II (3) Laporan Hasil SPKP-Triwulan III	(1) Laporan Hasil SPKP-Triwulan I (2) Laporan Hasil SPKP-Triwulan II (3) Laporan Hasil SPKP-Triwulan III

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
115	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Keterangan: a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A	1		(1) HASIL SURVEI TERPUBLIKASI	(1) HASIL SURVEI TERPUBLIKASI
116	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat Keterangan: a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A	1		(1) Tindak Lanjut Hasil Survei Triwulan I (2) Tindak Lanjut Hasil Survei Triwulan II (3) Tindak Lanjut Hasil Survei Triwulan III	(1) Tindak Lanjut Hasil Survei Triwulan I (2) Tindak Lanjut Hasil Survei Triwulan II (3) Tindak Lanjut Hasil Survei Triwulan III
117	Pemanfaatan Teknologi Informasi		1	100%		
118	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Keterangan: a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A	1		(1) BERITA DI MEDIA SOCIAL INSTAGRAM (2) BERITA DI MEDIA YOUTUBE (3) PUBLIKASI BERITA DAN PPDB DI WEBSITE (4) FORM PENGADUAN PELAYANAN (5) PELAYANAN MELALUI ONLINE (6) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE	(1) PUBLIKASI BERITA DAN PPDB DI WEBSITE (2) FORM PENGADUAN PELAYANAN (3) BERITA DI MEDIA SOCIAL INSTAGRAM (4) BERITA DI MEDIA YOUTUBE (5) PELAYANAN MELALUI ONLINE (6) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE
119	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi Keterangan: Ya, jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Y	1		(1) FORM PENGADUAN PELAYANAN (2) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE (3) PUBLIKASI BERITA DAN PPDB DI WEBSITE	(1) FORM PENGADUAN PELAYANAN (2) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE (3) PUBLIKASI BERITA DAN PPDB DI WEBSITE
120	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus Keterangan: a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		(1) FLAYER LAPOR (2) LIVE CHAT DI WEBSITE	(1) FLAYER LAPOR (2) LIVE CHAT DI WEBSITE
121	REFORM		24.82	82.74%		
122	MANAJEMEN PERUBAHAN		3.67	91.75%		
123	Komitmen dalam perubahan		2	100%		
124	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) Keterangan: Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan		100%	1		
125	- Jumlah Agen Perubahan Keterangan: Jumlah Agen Perubahan pada instansi	6			(1) SK AGEN PERUBAHAN 2025 (2) Matriks Ketercapaian Program ZI	(1) SK AGEN PERUBAHAN 2025 (2) Matriks Ketercapaian Program ZI
126	- Jumlah Perubahan yang dibuat Keterangan: Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan	6			(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ok (2) Matriks Ketercapaian Program ZI (3) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI (4) HASIL MONEV DI TL	(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ok (2) Matriks Ketercapaian Program ZI (3) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI (4) HASIL MONEV DI TL

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
127	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen Keterangan: Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		100%	1		
128	- Jumlah Perubahan yang dibuat Keterangan: Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan	6			(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (2) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI (3) Matriks Ketercapaian Program ZI (4) HASIL MONEV DI TL	(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (2) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI (3) Matriks Ketercapaian Program ZI (4) HASIL MONEV DI TL
129	- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen Keterangan: Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen	6			(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (2) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI (3) Matriks Ketercapaian Program ZI (4) HASIL MONEV DI TL	(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (2) LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI (3) Matriks Ketercapaian Program ZI (4) HASIL MONEV DI TL
130	Komitmen Pimpinan		1	100%		
131	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan Keterangan: a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja	A	1		(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (2) laporan monev zi_2025 ok (3) dokumen pimpinan (4) Matriks Ketercapaian Program ZI (5) FOTO PROSES PEMBANGUNAN OK	(1) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (2) laporan monev zi_2025 ok (3) dokumen pimpinan (4) Matriks Ketercapaian Program ZI (5) FOTO PROSES PEMBANGUNAN OK
132	Membangun Budaya Kerja		0.67	67%		
133	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Keterangan: a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	B	0.67		(1) pakta integritas zona zi (2) SOP MTSN 2 LAMONGAN	(1) pakta integritas zona zi (2) SOP MTSN 2 LAMONGAN
134	PENATAAN TATALAKSANA		3.34	95.29%		
135	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan		0.34	67%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
136	<p>Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan</p> <p>b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan</p> <p>c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan</p> <p>d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan</p>	B	0.67		(1) KMA 1364 TAHUN 2021 (2) SK SOP_page-0001	<p>(1) KMA 1364 TAHUN 2021</p> <p>(2) SK SOP_page-0001</p>
137	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi		1	100%		
138	<p>Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien</p> <p>b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)</p> <p>c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien</p>	A	1		(1) capture sipka (2) screenshot Aplikasi kepegawean (3) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (4) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE	<p>(1) capture sipka</p> <p>(2) screenshot Aplikasi kepegawean</p> <p>(3) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN</p> <p>(4) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE</p>
139	<p>Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien</p> <p>b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)</p> <p>c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien</p>	A	1		(1) screenshot Aplikasi kepegawean (2) screenshot EMIS (3) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN (4) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE	<p>(1) screenshot Aplikasi kepegawean</p> <p>(2) screenshot EMIS</p> <p>(3) INOVASI YANG DIMILIKI MTsN 2 LAMONGAN</p> <p>(4) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE</p>
140	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat		2	100%		
141	<p>Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama</p> <p>e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan</p>	A	1		(1) Matriks Before-After Transformasi Digital pada Bidang Proses Bisnis Utama di MTsN 2 Lamongan	(1) Matriks Before-After Transformasi Digital pada Bidang Proses Bisnis Utama di MTsN 2 Lamongan

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
142	<p>Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan</p> <p>e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan</p>	A	1		(1) Transformasi Digital MTsN 2 Lamongan pada Bidang Administrasi Pemerintahan	(1) Transformasi Digital MTsN 2 Lamongan pada Bidang Administrasi Pemerintahan
143	<p>Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik</p> <p>e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan</p>	A	1		(1) Transformasi Digital MTsN 2 LamonganI pada Bidang Pelayanan Publik	(1) Transformasi Digital MTsN 2 LamonganI pada Bidang Pelayanan Publik
144	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		3	60%		
145	Kinerja Individu		1.5	100%		
146	<p>Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya</p> <p>b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya</p> <p>c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)</p>	A	1		(1) 3 PERKIN 2025 (2) Laporan Capaian Kinerja Tahunan_2024 (3) LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (4) SKP	(1) 3 PERKIN 2025 (2) Laporan Capaian Kinerja Tahunan_2024 (3) LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2025 TRIWULAN I, II, & III (4) SKP
147	Assesment Pegawai		1.5	100%		
148	<p>Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Seluruh hasil assesment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai</p> <p>b. Hasil assesment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai</p> <p>c. Hasil assesment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai</p>	A	1		(1) LAPORAN HASIL SUPERVISI (2) TNA MTsN 2 lamongan 2025	(1) TNA MTsN 2 lamongan 2025 (2) LAPORAN HASIL SUPERVISI
149	Pelanggaran Disiplin Pegawai		0	0%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
150	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Keterangan: Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		100%	0		
151	- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya Keterangan: Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun sebelumnya	0			(1) SK Reward & Punishment Guru Pegawai 2025 (2) UPDATE_PP Nomor 94 Tahun 2021 (3) Rekap Pelanggaran dan Sanksi PP No. 94 th 2021 (4) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025	(1) UPDATE_PP Nomor 94 Tahun 2021 (2) SK Reward & Punishment Guru Pegawai 2025 (3) Rekap Pelanggaran dan Sanksi PP No. 94 th 2021 (4) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025
152	- Jumlah pelanggaran tahun ini Keterangan: Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun ini/tahun berjalan	0			(1) Rekap Pelanggaran dan Sanksi PP No. 94 th 2021 (2) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025 (3) UPDATE_PP Nomor 94 Tahun 2021	(1) Rekap Pelanggaran dan Sanksi PP No. 94 th 2021 (2) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025 (3) UPDATE_PP Nomor 94 Tahun 2021
153	- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman Keterangan: Jumlah pelanggaran disiplin pegawai yang telah diberikan sanksi/hukuman	0			(1) Rekap Pelanggaran dan Sanksi PP No. 94 th 2021 - Copy (2) UPDATE_Laporan Monitoring Implementasi Kode Etik (3) UPDATE_Laporan TL Monitoring Implementasi Kode Etik (4) UPDATE_PP Nomor 94 Tahun 2021 (5) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025	(1) UPDATE_Laporan Monitoring Implementasi Kode Etik (2) Rekap Pelanggaran dan Sanksi PP No. 94 th 2021 - Copy (3) UPDATE_PP Nomor 94 Tahun 2021 (4) UPDATE_Laporan TL Monitoring Implementasi Kode Etik (5) Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku_2025
154	PENGUATAN AKUNTABILITAS		4.32	86.32%		
155	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja		1.32	65.79%		
156	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih Keterangan: Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja		65.79%	0.66		
157	- Jumlah Sasaran Kinerja Keterangan: Jumlah Sasaran Kinerja Unit Kerja/Organisasi	38			(1) PERKIN 2025 ok (2) CAPAIAN KINERJA (3) LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	(1) LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN (2) CAPAIAN KINERJA (3) PERKIN 2025 ok
158	- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih Keterangan: Jumlah Sasaran Kinerja UNit Kerja/Organisasi yang tercapai 100% atau lebih	25			(1) CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (2) LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	(1) CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (2) LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
159	Pemberian Reward and Punishment		1.5	100%		
160	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi Keterangan: a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment	A	1		(1) SK Reward & Punishment Guru Pegawai 2025 (2) Dokumen reward	(1) SK Reward & Punishment Guru Pegawai 2025 (2) Dokumen reward
161	Kerangka Logis Kinerja		1.5	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
162	<p>Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai</p> <p>b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai</p> <p>c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai</p> <p>d. Kerangka Logis kinerja belum ada</p>	A	1		(1) Matrik Manajemen Risiko renstra (2) Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (3) SKP	<p>(1) Matrik Manajemen Risiko renstra</p> <p>(2) Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan</p> <p>(3) SKP</p>
163	Penguatan Pengawasan		5.5	73.33%		
164	Mekanisme Pengendalian		2.5	100%		
165	<p>Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali</p> <p>b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja</p> <p>c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas</p> <p>d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem</p> <p>e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi</p>	A	1		(1) Laporan Supervisi (2) Data Siswa Kelas IX Berprestasi Tahun Pelajaran 2024-2025 (3) Inovasi SRA MTsN 2 Lamongan (4) Identifikasi Risiko (5) penilaian Kegiatan Pengendalian Risiko 2025 (6) Matrik Manajemen Risiko	<p>(1) Laporan Supervisi</p> <p>(2) Data Siswa Kelas IX Berprestasi Tahun Pelajaran 2024-2025</p> <p>(3) Inovasi SRA MTsN 2 Lamongan</p> <p>(4) Identifikasi Risiko</p> <p>(5) penilaian Kegiatan Pengendalian Risiko 2025</p> <p>(6) Matrik Manajemen Risiko</p>
166	Penanganan Pengaduan Masyarakat		3	100%		
167	<p>Persentase penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan</p>		100%	1		
168	<p>- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah dumas yang harus ditindaklanjuti</p>	12			(1) Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat Januari sd Desember (2) Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Januari sd desember (3) Matriks TL Monev Penanganan Januari sd desember (4) SK Tim Dumas dan WBS	<p>(1) Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat Januari sd Desember</p> <p>(2) Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Januari sd desember</p> <p>(3) Matriks TL Monev Penanganan Januari sd desember</p> <p>(4) SK Tim Dumas dan WBS</p>
169	<p>- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah dumas dalam diproses</p>	12			(1) Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Januari sd desember (2) Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat Januari sd Desember (3) Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Januari sd desember (4) Matriks TL Monev Penanganan Januari sd desember	<p>(1) Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Januari sd desember</p> <p>(2) Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat Januari sd Desember</p> <p>(3) Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Januari sd desember</p> <p>(4) Matriks TL Monev Penanganan Januari sd desember</p>
170	<p>- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah dumas yang selesai di TL</p>	12			(1) Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Januari sd desember (2) Matriks TL Monev Penanganan Januari sd desember	<p>(1) Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Januari sd desember</p> <p>(2) Matriks TL Monev Penanganan Januari sd desember</p>

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
171	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan		0	0%		
172	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)					
173	Persentase penyampaian LHKPN Keterangan: Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005		100%	0		
174	Jumlah yang harus melaporkan Keterangan: Jumlah yang harus melaporkan LHKPN		0			
175	- Kepala satuan kerja Keterangan: Penyampaian LHKPN bagi Kepala Satker	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN
176	- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Keterangan: Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN
177	- Lainnya Keterangan: Pegawai Lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN
178	Jumlah yang sudah melaporkan Keterangan: Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN
179	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)					
180	Persentase penyampaian LHKASN Keterangan: Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015		100%	0		
181	Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) Keterangan: Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)		0			
182	- Pejabat administrator (eselon III) Keterangan: Pejabat administrator (eselon III)	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN (2) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
183	- Pejabat Pengawas (eselon IV) Keterangan: Pejabat Pengawas (eselon IV)	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN (2) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
184	- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Keterangan: Jumlah Fungsional dan Pelaksana	0			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN (2) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
185	Jumlah yang sudah melaporkan Keterangan: Jumlah yang sudah melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)	74			(1) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) (2) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN	(1) Laporan LHKAN MTsN 2 LAMONGAN (2) REKAPITULASI DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
186	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5	100%		
187	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik		2.5	100%		
188	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Keterangan: a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A	1		MTsN 2 Lamongan tela(1) SK STANDAR PELAYANAN (2) MATRIK LAYANAN PTSP MTsN 2 LAMONGAN (3) Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan 2025h melakukan upaya dan/atau inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	(1) SK STANDAR PELAYANAN (2) MATRIK LAYANAN PTSP MTsN 2 LAMONGAN (3) Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan 2025
189	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi Keterangan: Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar		100%	1		
190	- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar Keterangan: Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	3			(1) MATRIK LAYANAN PTSP MTsN 2 LAMONGAN (2) Matriks pelayanan yang dipermudah	(1) MATRIK LAYANAN PTSP MTsN 2 LAMONGAN (2) Matriks pelayanan yang dipermudah
191	- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah Keterangan: Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah	3			(1) MATRIK LAYANAN PTSP MTsN 2 LAMONGAN (2) Matriks pelayanan yang dipermudah (3) SK STANDAR PELAYANAN	(1) MATRIK LAYANAN PTSP MTsN 2 LAMONGAN (2) Matriks pelayanan yang dipermudah (3) SK STANDAR PELAYANAN
192	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi		2.5	100%		
193	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab Keterangan: a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A	1		(1) SK STANDAR PELAYANAN (2) BUKTI SCREENSHOT PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN DAN KONSULTASI	(1) SK STANDAR PELAYANAN (2) BUKTI SCREENSHOT PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN DAN KONSULTASI

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	CATATAN SATUAN/UNIT KERJA	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
194	HASIL		35.63	89.06%		
195	BIROKRASI BERSIH AKUNTABEL		18.13	80.56%		
196	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) Keterangan: Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK) Nilai (0-4)	3	13.13		(1) Laporan SPAK Triwulan I Tahun 2025 (2) Laporan SPAK Triwulan II Tahun 2025 (3) Laporan SPAK Triwulan III Tahun 2025	(1) Laporan SPAK Triwulan I Tahun 2025 (2) Laporan SPAK Triwulan II Tahun 2025 (3) Laporan SPAK Triwulan III Tahun 2025
197	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya Keterangan: a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b. Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	A	5		(1) CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (2) CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	(1) CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (2) CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
198	PELAYANAN PUBLIK PRIMA		17.5	100%		
199	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) Keterangan: Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) Nilai (0-4)	4	17.5		(1) Laporan Hasil SPKP-Triwulan I 2025 (2) Laporan Hasil SPKP-Triwulan II 2025 (3) Laporan Hasil SPKP-Triwulan III 2025	(1) Laporan Hasil SPKP-Triwulan I 2025 (2) Laporan Hasil SPKP-Triwulan II 2025 (3) Laporan Hasil SPKP-Triwulan III 2025
INDEKS PMPZI		88.76				